

SIARAN PERS

11 Oktober 2022

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMERATAAN AKSES DIGITAL DI INDONESIA



PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMERATAAN AKSES DIGITAL DI INDONESIA

Mayoritas masyarakat merasa akses digital di Indonesia sudah merata, lebih dari 50% responden menganggap kinerja pemerintah dalam menjamin pemerataan akses digital sudah baik, dan sebagian besar umumnya pernah mengakses aplikasi belanja online sebesar 55% serta transportasi online sebesar 36% selama sebulan terakhir.



Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia meluncurkan laporan rilis survei telepon nasional bertajuk “Persepsi Masyarakat tentang Pemerataan Akses Digital di Indonesia” yang merupakan bagian dari riset independen memotret perilaku dan persepsi masyarakat seputar isu pemerataan akses, keamanan data, serta perilaku digital di tengah pesatnya transformasi serta digitalisasi sektor ekonomi tradisional di Indonesia. Dalam laporan survei telepon yang dilakukan dalam periode 5-8 Agustus 2022 lalu dengan metode pemilihan sampel responden teknik RDD (Random Digit Dialing) menasar 1201 responden yang tersebar di seluruh Indonesia, ditemukan berbagai temuan kunci terkait isu persepsi pemerataan akses digital, pola perilaku pengguna aplikasi digital, serta isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat seputar sektor ekonomi digital di tanah air.

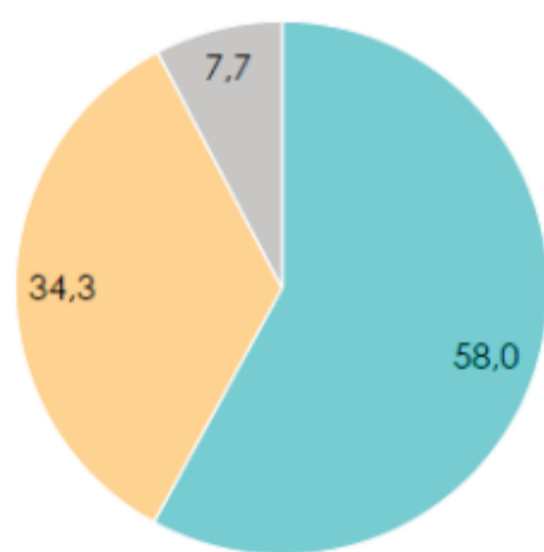
I. PERSEPSI DAN TINGKAT KEPUASAN PEMERATAAN AKSES DIGITAL ATAS KINERJA PEMERINTAH DI MATA MASYARAKAT

Lebih dari separuh masyarakat Indonesia, 58%, menilai aplikasi digital sudah dapat dinikmati secara merata di seluruh Indonesia. Yang menyebut pemerataan akses aplikasi digital masih sekitar 34%. Beberapa alasan utama respon warga sebagai penyebab belum meratanya akses digital di tanah air, antara lain terkait jaringan internet yang belum merata, tingkat kepemilikan smartphone atau ponsel cerdas, belum memadainya tingkat pengetahuan untuk menggunakan aplikasi digital, harga kuota yang masih mahal, dll. Namun, mayoritas warga (50,1%) juga mengapresiasi kinerja Pemerintah saat ini dalam mendorong dan mengakselerasi pemerataan akses teknologi (terutama dalam penggunaan aplikasi digital) di seluruh Indonesia.

APLIKASI DIGITAL SUDAH MERATA DINIKMATI MASYARAKAT INDONESIA?

Menurut Ibu/Bapak, apakah saat ini aplikasi digital sudah secara merata dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia?... (%)

■ Sudah ■ Belum ■ Tidak tahu/tidak jawab

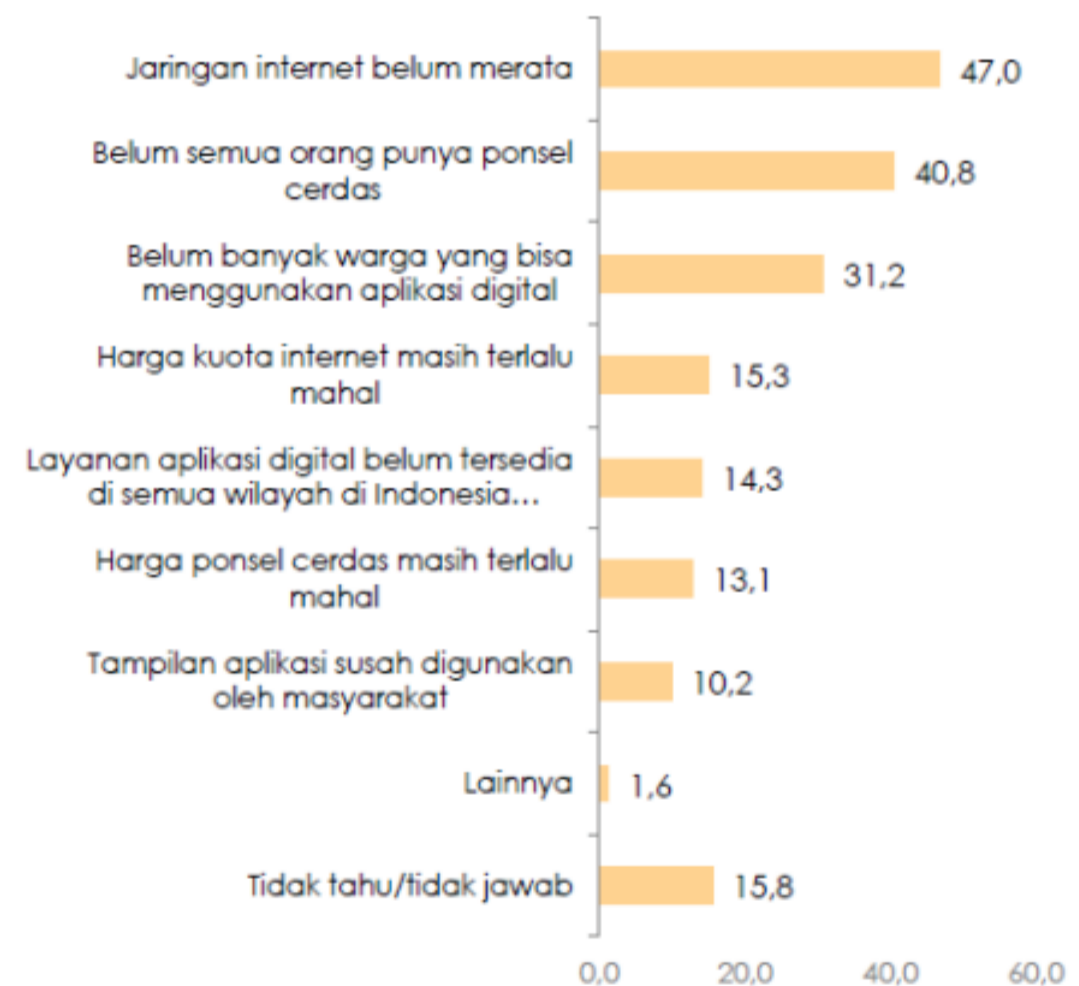


Sebagian besar menilai bahwa aplikasi digital sudah secara merata dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia (58%), belum merata 34,3% dan selebihnya tidak berpendapat.

Jika masih belum merata, persoalan infrastruktur (jaringan internet) lebih banyak disebut. Kemudian kepemilikan ponsel cerdas, dan faktor kemampuan dalam menggunakan aplikasi digital.

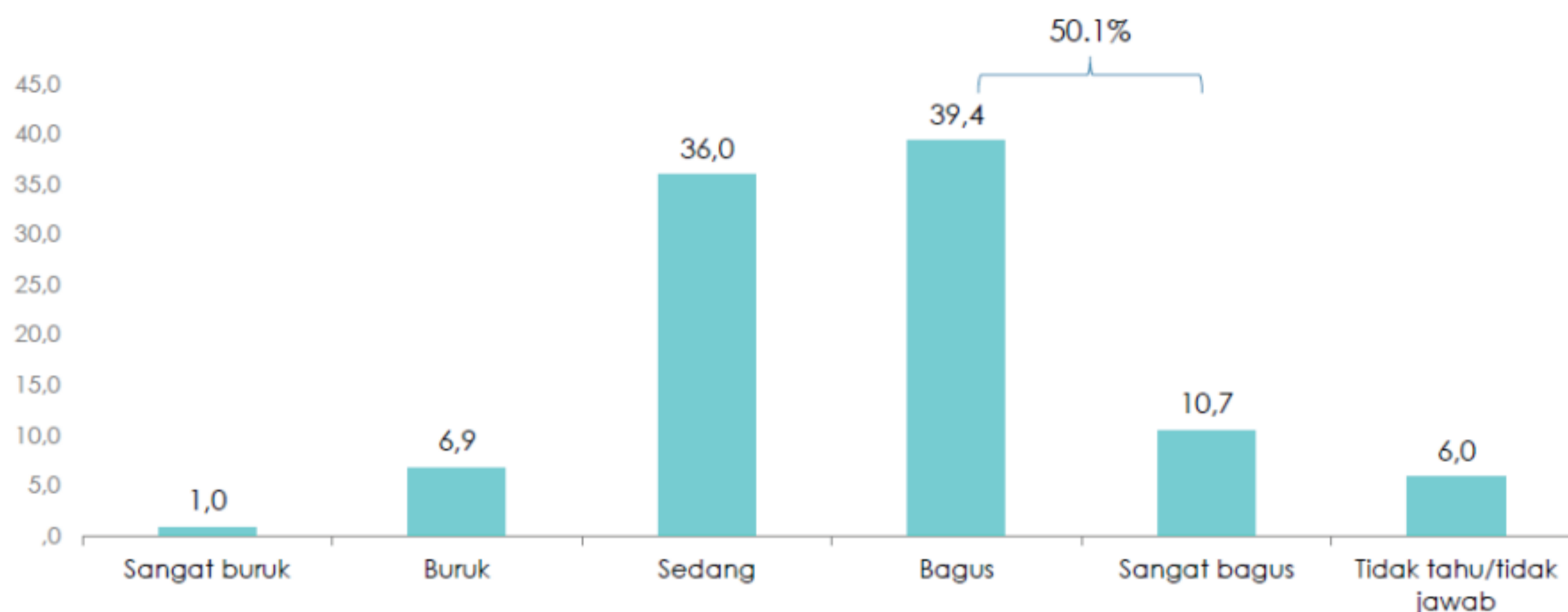
Menurut Ibu/Bapak apakah penyebab utama aplikasi digital belum dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia? ... (%)

(bisa lebih dari satu jawaban, maksimal 3 jawaban)



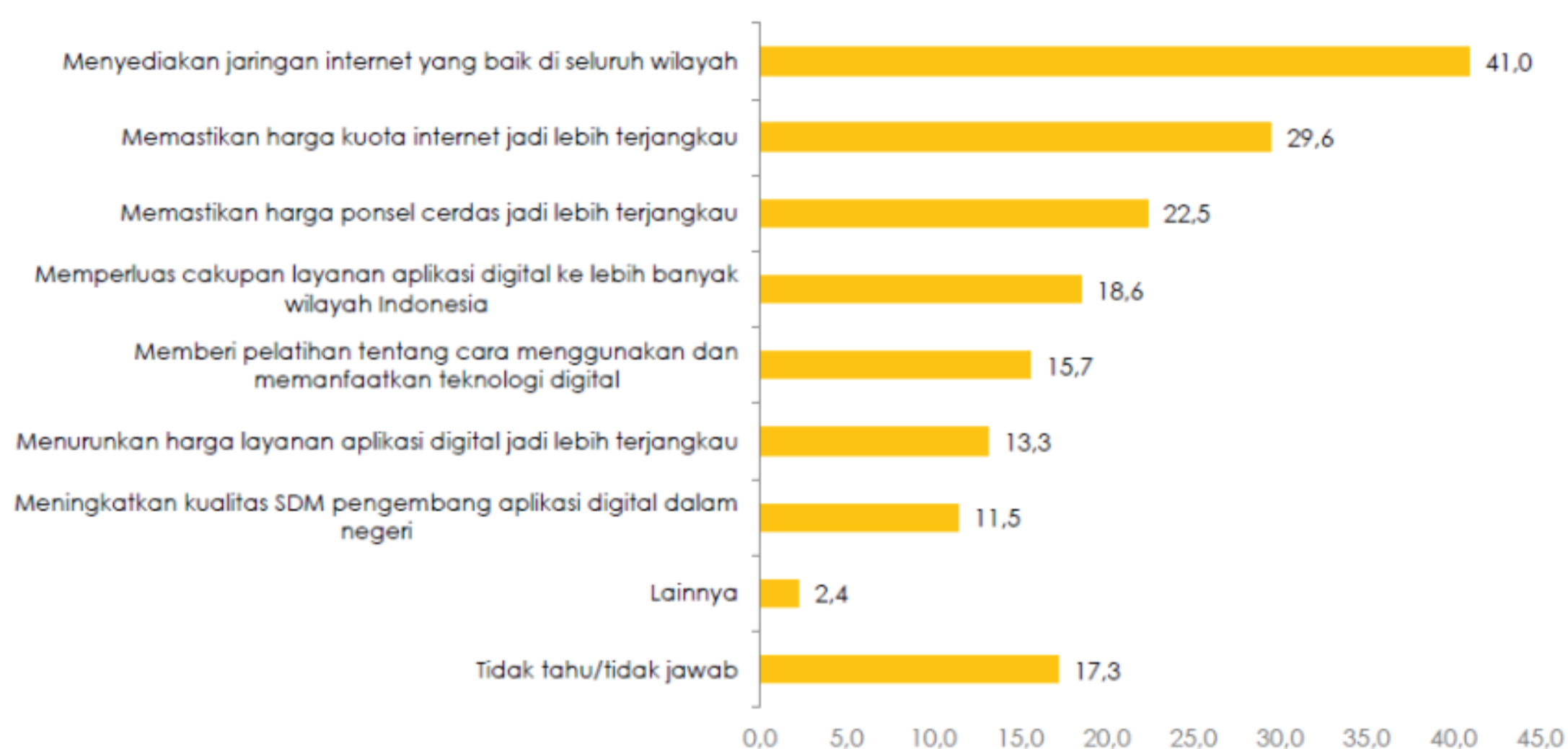
KINERJA PEMERINTAH MENDORONG PEMERATAAN AKSES TEKNOLOGI DI SELURUH INDONESIA

Menurut penilaian Ibu/Bapak, bagaimana upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan akses teknologi (terutama aplikasi digital) di seluruh Indonesia?... (%)



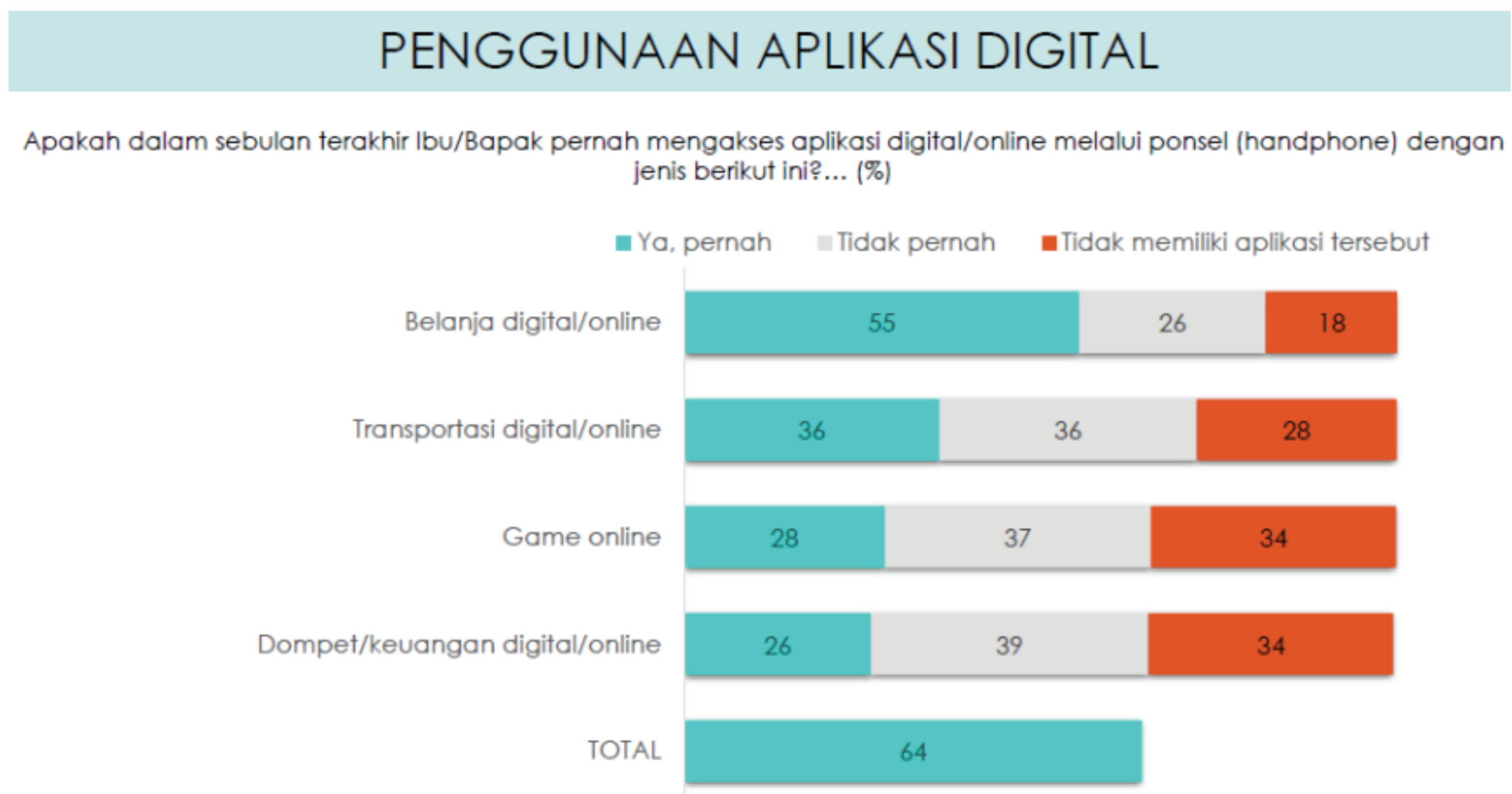
HAL YANG HARUS MENJADI PERHATIAN PEMERINTAH AGAR SELURUH MASYARAKAT BISA MENGAKSES TEKNOLOGI DIGITAL

Menurut Ibu/Bapak, apa yang paling harus diperhatikan pemerintah agar seluruh masyarakat bisa mengakses teknologi digital?... (%)
(bisa lebih dari satu jawaban, maksimal 3 jawaban)



II. PERILAKU DIGITAL MASYARAKAT INDONESIA

Sekitar 64% responden pernah menggunakan aplikasi digital dalam sebulan terakhir untuk berbagai keperluan. Lalu sekitar 55% lainnya pernah menggunakan aplikasi digital untuk belanja online, sekitar 36% untuk transportasi online, sekitar 28% untuk game online, dan sekitar 26% untuk dompet digital.



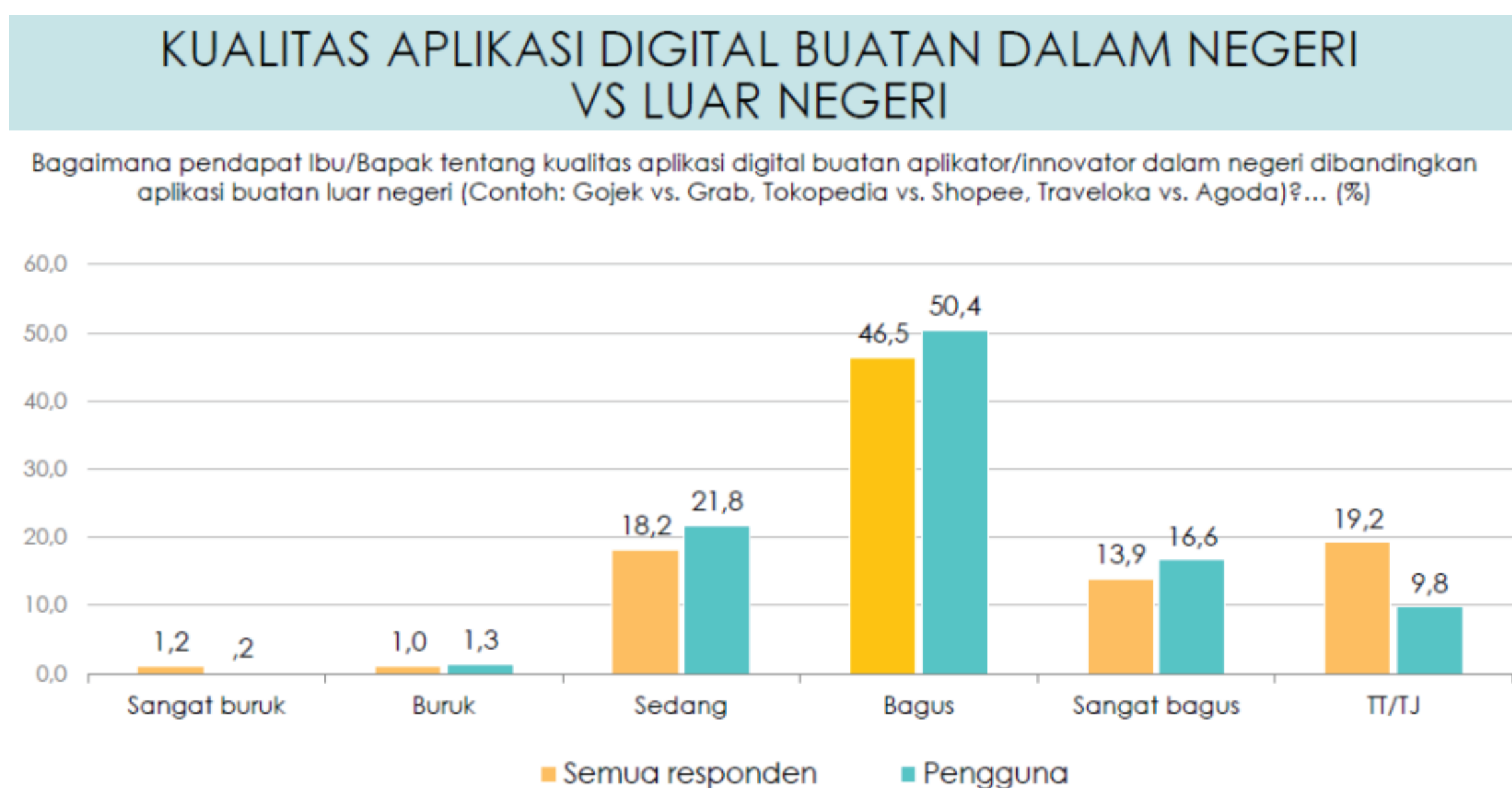
Berdasar distribusi wilayah, pengguna aplikasi digital cenderung terkonsentrasi di sekitar wilayah Barat Indonesia, terutama di Pulau Jawa, dan lebih khusus lagi DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pulau Jawa memiliki konsentrasi penduduk hampir 60% nasional, dan lebih dari sepertiganya terkonsentrasi di DKI dan Jawa Barat. Oleh sebab itu, semakin padat penduduk, maka semakin kompleks aktivitas warga dan semakin tinggi kebutuhan terhadap barang dan jasa sehingga kebutuhan akan kecepatan bertransaksi serta konektivitas juga semakin tinggi.

PENGGUNAAN APLIKASI DIGITAL MENURUT DEMOGRAFI

	BASE	Transportasi digital/online			Belanja digital/online			Dompet/keuangan digital/online			Game online		
		Ya, pernah	Tidak pernah	Tidak memiliki aplikasi tersebut/TJ	Ya, pernah	Tidak pernah	Tidak memiliki aplikasi tersebut/TJ	Ya, pernah	Tidak pernah	Tidak memiliki aplikasi tersebut/TJ	Ya, pernah	Tidak pernah	Tidak memiliki aplikasi tersebut/TJ
DESA/KOTA													
Pedesaan	50.0	26.5	41.0	32.6	50.9	27.6	21.4	22.1	43.5	34.4	26.6	41.4	32.0
Perkotaan	50.0	45.1	31.3	23.7	59.9	24.8	15.4	30.2	34.5	35.3	29.7	33.1	37.2
WILAYAH													
SUMATERA	20.4	31.6	41.9	26.4	55.5	24.0	20.4	22.4	41.5	36.1	32.6	42.8	24.6
BANTEN	4.3	29.1	38.9	32.0	46.0	32.8	21.3	30.0	38.0	32.0	26.3	39.7	34.0
DKI	4.1	86.4	6.9	6.7	84.9	9.5	5.6	72.1	25.0	2.9	46.7	37.4	15.9
JABAR	17.4	43.4	23.7	32.9	79.7	12.7	7.6	35.8	24.8	39.4	32.1	26.8	41.1
JATENG/DIY	16.1	38.0	46.4	15.5	54.2	32.0	13.8	29.8	48.5	21.6	37.2	34.1	28.7
JATIM	16.2	35.9	38.1	26.0	49.7	26.2	24.0	13.8	34.8	51.4	12.8	39.1	48.1
BALI NUSA	5.3	14.9	41.7	43.4	24.6	48.3	27.1	19.7	50.9	29.5	25.8	24.8	49.4
KALIMANTAN	5.9	24.6	14.1	61.3	37.0	13.8	49.2	19.6	21.2	59.2	16.6	32.3	51.1
SULAWESI	7.0	25.0	49.8	25.2	41.7	48.1	10.2	15.7	63.9	20.4	23.4	55.9	20.7
MALUKU PAPUA	3.3	32.4	39.3	28.3	47.0	34.6	18.5	24.5	49.2	26.4	25.4	50.7	23.9

III. APLIKASI LOKAL VS ASING

Terkait dengan isu perbandingan kualitas aplikasi digital buatan dalam negeri (misal: Gojek, Tokopedia, Traveloka) dibandingkan dengan aplikasi digital buatan asing (misal: Grab, Shopee, Agoda), mayoritas warga umum, 60,4%, baik pengguna maupun non-pengguna aplikasi digital berpendapat bahwa kualitas aplikasi digital buatan aplikator/ inovator dalam negeri sangat bagus/bagus dibandingkan aplikasi buatan luar negeri. Bahkan di kalangan pengguna aplikasi digital, tingkat persepsi atas kualitas aplikasi digital buatan dalam negeri bahkan lebih tinggi mencapai 67% yang mengatakan bagus/sangat bagus.

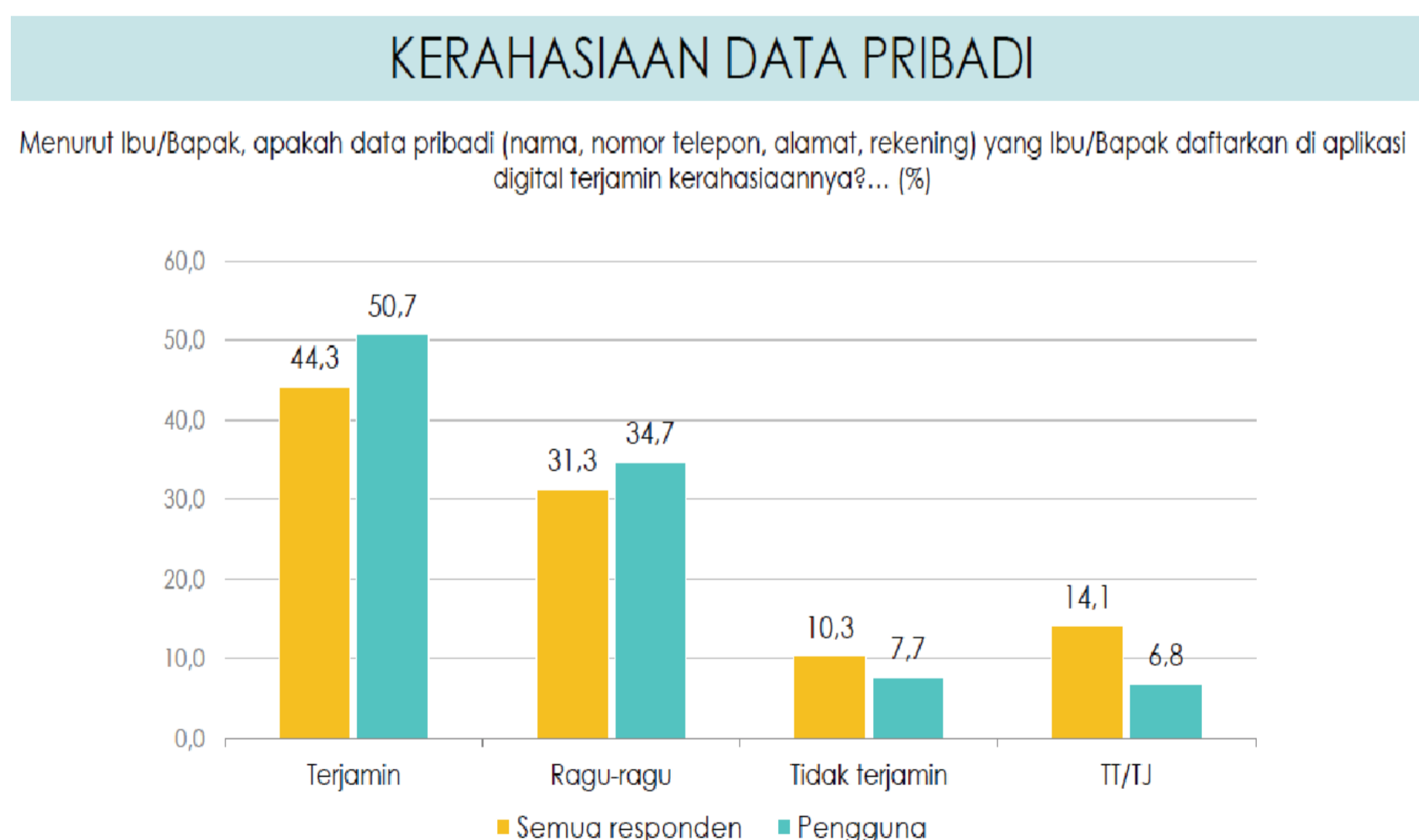


IV. ISU-ISU KEBIJAKAN TERKAIT EKONOMI DIGITAL

A. Isu Keamanan Data Pribadi dan RUU PDP

Pada tanggal 20 September yang lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu masyarakat. UU PDP diluncurkan ketika jagad maya tanah air digegerkan dengan kemunculan seorang peretas dengan nama Bjorka dan yang mengaku telah membobol sejumlah data milik pemerintah dan masyarakat Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk tim khusus untuk menyelesaikan dan mencari tahu identitas dibalik akun peretas tersebut.

Dalam hasil survei telepon Indikator, persepsi dan opini masyarakat terkait isu keamanan data juga menjadi salah satu isu yang menjadi fokus riset teknologi aplikasi digital ini. Sangat banyak warga yang meragukan (31.3%) atau bahkan merasa data pribadi yang didaftarkan dalam aplikasi digital tidak terjamin kerahasiaannya (10.3%), total sekitar 41.6%. Begitu juga pada kelompok pengguna aplikasi digital, sekitar 34.7% ragu dan 7.7% merasa tidak terjamin, total sekitar 42.4%. Kelompok yang ragu atau bahkan merasa tidak terjamin kerahasiaan data pribadinya terutama kelompok perempuan, kelompok ibu rumah tangga dan petani, pendapatan paling rendah, di pedesaan, terutama di wilayah Jawa Timur, Bali Nusa, Kalimantan dan Maluku Papua.



KERAHASIAAN DATA PRIBADI MENURUT DEMOGRAFI [KHUSUS PENGGUNA APLIKASI DIGITAL]

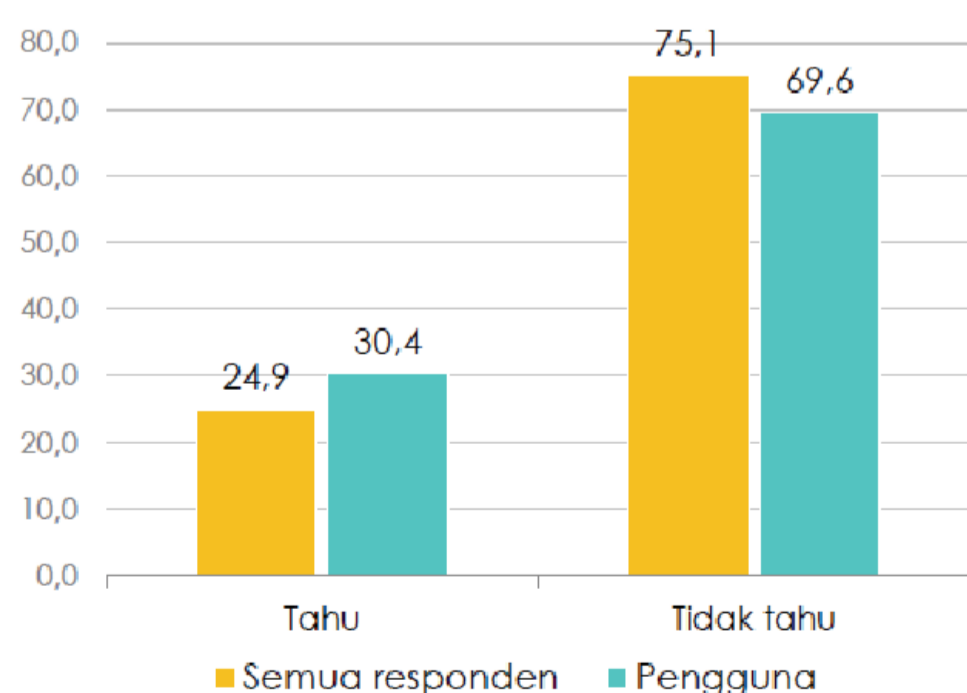
	Base	Terjamin	Ragu-ragu	Tidak terjamin	TT/TJ
GENDER					
Laki-laki	47.9	54.9	28.0	7.2	9.9
Perempuan	52.1	46.9	40.9	8.1	4.0
USIA					
<= 21 tahun	16.6	55.0	32.8	9.4	2.8
22 - 25 tahun	15.3	52.4	30.4	14.9	2.3
26 - 40 tahun	41.9	46.2	35.8	7.3	10.7
41 - 55 tahun	17.3	60.4	31.8	2.8	5.0
> 55 tahun	8.9	42.7	46.7	3.3	7.4
PENDIDIKAN					
<= SD	25.0	53.6	22.0	7.8	16.6
SLTP	17.9	36.5	50.1	5.8	7.5
SLTA	37.7	54.1	35.7	7.7	2.5
Kuliah	19.4	54.0	35.2	9.3	1.5
PEKERJAAN					
Petani/peternak/nelayan	9.1	36.3	47.1	3.3	13.3
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	26.1	59.2	27.5	6.9	6.4
Wiraswasta, pengusaha	8.2	50.2	35.2	6.1	8.5
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	15.4	58.0	35.7	5.8	0.5
Ibu Rumah Tangga	24.2	40.5	44.4	9.0	6.2
Masih sekolah/kuliah	8.9	47.9	32.5	16.5	3.1
Lainnya	8.1	62.6	20.8	7.8	8.8

	Base	Terjamin	Ragu-ragu	Tidak terjamin	TT/TJ
PENDAPATAN					
< 1 juta	12.3	35.9	32.9	18.5	12.6
1 - < 2 juta	21.2	54.4	32.1	7.1	6.4
2 - < 4 juta	37.4	56.0	33.4	5.7	4.9
=> 4 juta	29.1	55.2	32.4	8.5	3.9
DESA/KOTA					
Pedesaan	46.4	49.7	37.7	3.7	8.8
Perkotaan	53.6	51.6	32.2	11.1	5.1
WILAYAH					
SUMATERA	21.2	44.0	29.5	12.2	14.4
BANTEN	3.5	50.4	42.2	3.5	3.9
DKI	6.3	75.2	16.4	4.6	3.8
JABAR	22.9	54.0	35.0	8.2	2.8
JATENG DIY	16.0	55.1	35.7	4.0	5.1
JATIM	18.5	38.9	49.0	5.1	6.9
BAU NUSA	3.5	43.0	48.1	8.9	0.0
KALIMANTAN	4.2	68.0	22.5	7.7	1.7
SULAWESI	6.0	50.9	26.8	6.7	15.5
MALUKU PAPUA	3.0	37.8	47.1	15.2	0.0

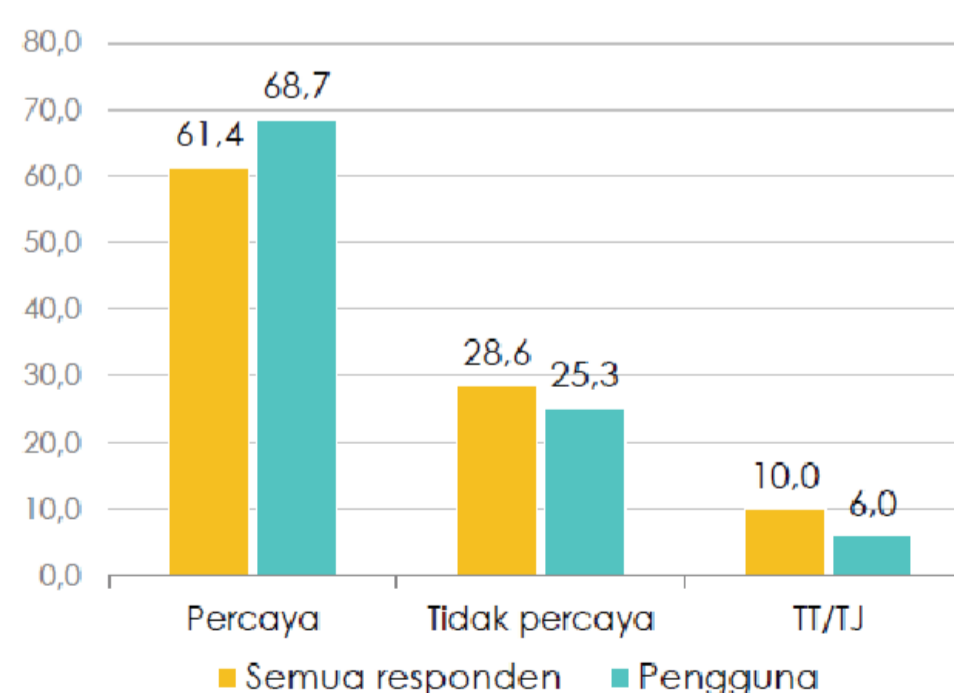
Terkait isu UU PDP yang baru saja disahkan, meskipun mayoritas (75.1%) belum pernah dengar atau mengetahui tentang RUU PDP, namun mayoritas warga semakin percaya data pribadi akan terlindungi jika UU PDP diberlakukan (61.4%). Berkaca dari data tersebut, pihak Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi terkait implementasi UU PDP sehingga masyarakat tahu eksistensinya dan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban mereka sehingga tingkat kepercayaan publik akan keamanan dan perlindungan data pribadi di dunia digital juga semakin meningkat.

RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar bahwa DPR dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyusun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi?... (%)

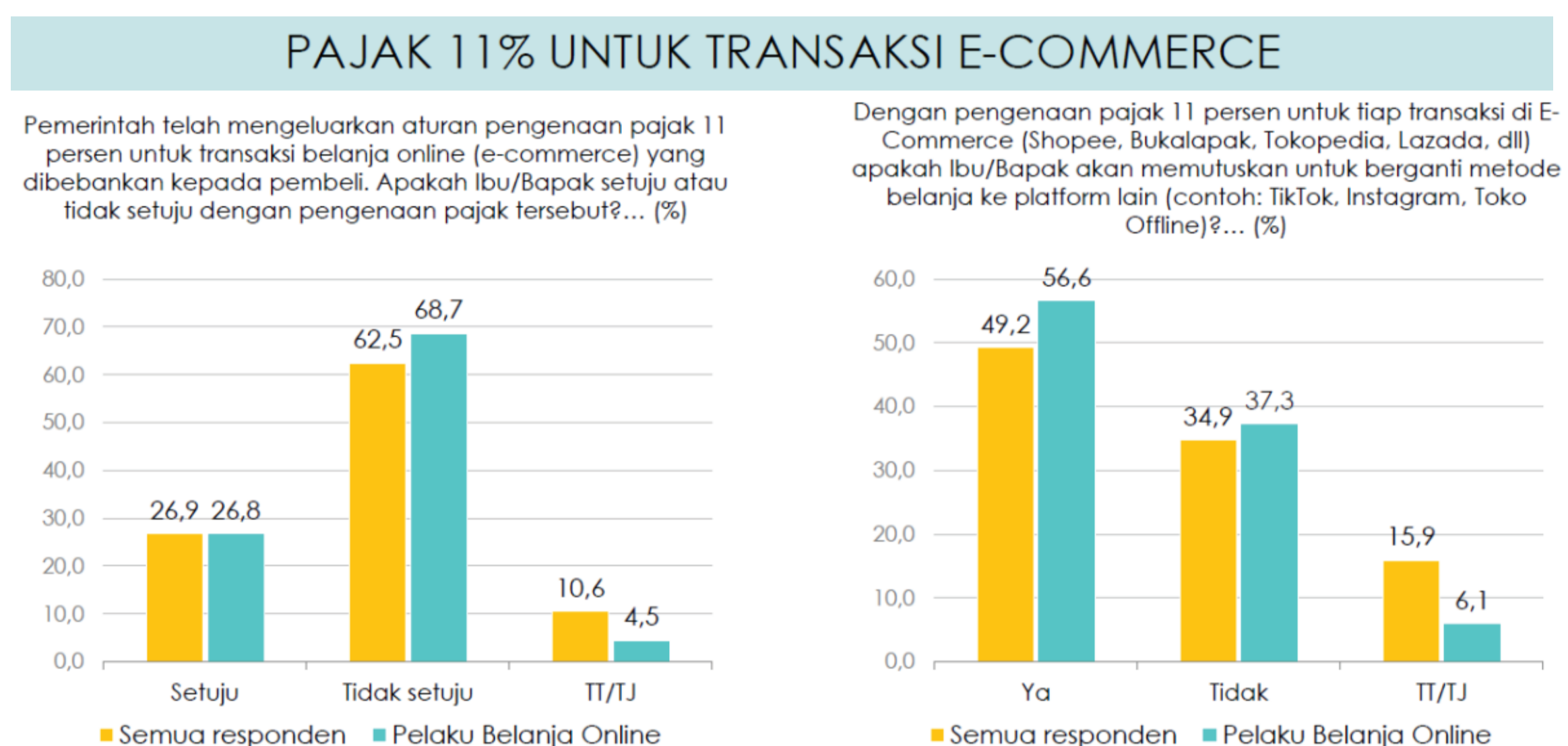


Apakah Ibu/Bapak percaya atau tidak percaya jika Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diberlakukan, maka akan dapat melindungi data pribadi Ibu/Bapak di dunia maya/digital?... (%)



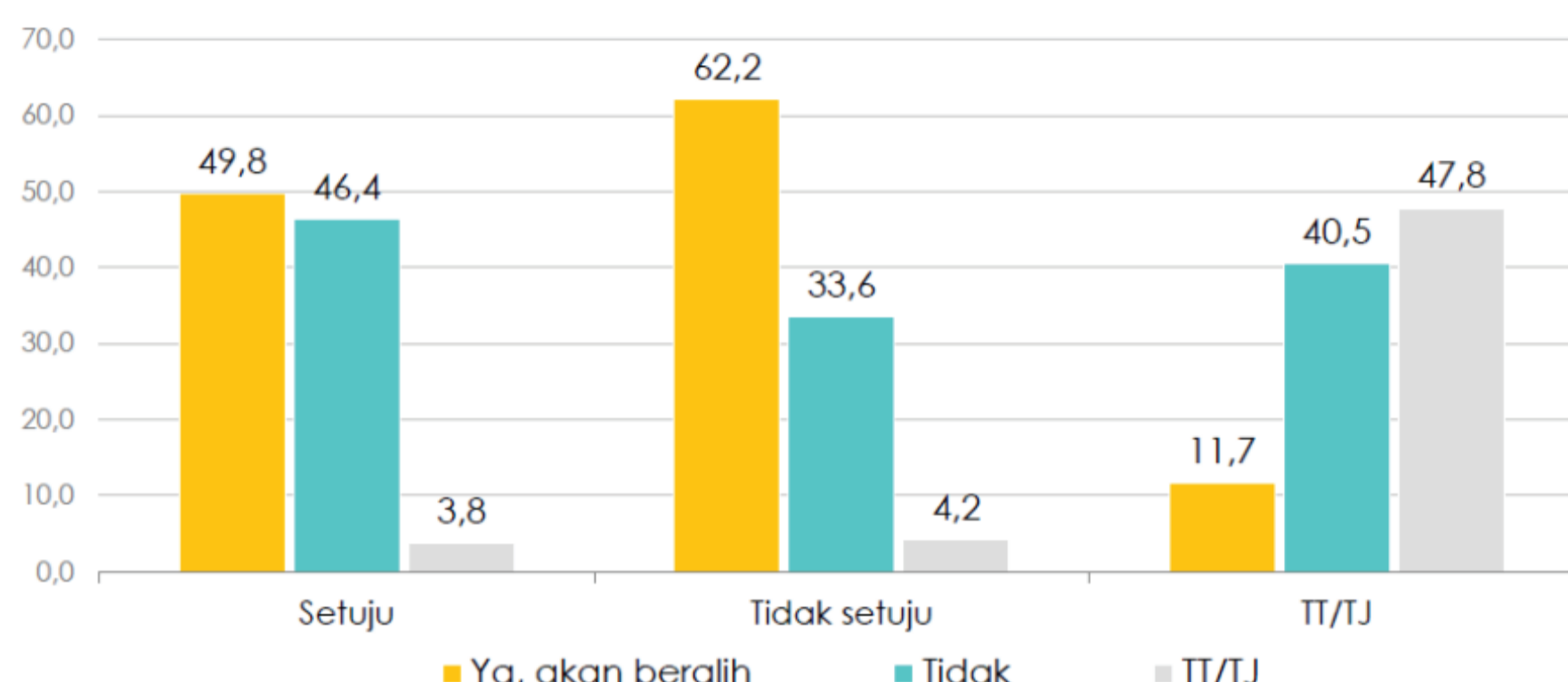
B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% untuk transaksi E-Commerce

Mayoritas kalangan warga umum pelaku maupun non-pelaku belanja online (62,5%) tidak setuju dengan aturan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPn) 11 persen untuk transaksi di e-commerce berjenis marketplace yang dibebankan kepada pembeli, terutama pada pelaku/pengguna e-commerce yang penolakannya mencapai 68,7%. Dan kebanyakan dari yang menolak menyatakan akan berganti metode belanja ke platform informal lain yang tidak dikenakan pajak, misalnya seperti social commerce (contoh: TikTok, Instagram) dan tempat perbelanjaan konvensional (contoh: toko offline).



Pada kelompok yang setuju dengan pengenaan tarif PPN 11%, separuhnya atau sekitar 49,8% juga menyatakan akan beralih ke platform/metode lain, terlebih pada kelompok yang tidak setuju, yakni sekitar 62% mengaku akan beralih ke platform lainnya. Jika tidak setuju dan tidak beralih, kemungkinan hanya menunggu waktu hingga beradaptasi dengan platform baru/lain.

BERALIH KE PLATFORM LAIN MENURUT PERSETUJUAN ATAS PENGENAAN TARIF PAJAK 11% UNTUK TRANSAKSI E-COMMERCE [KHUSUS PELAKU E-COMMERCE/BELANJA ONLINE]



Mayoritas pelaku e-commerce tidak setuju pengenaan tarif pajak 11% kepada pembeli di tiap basis demografi pengguna, kecuali di wilayah DKI Jakarta. Akibat pengenaan tarif pajak tersebut, mayoritas atau sebagian besar pelaku e-commerce akan beralih platform/metode belanja di sebagian besar kelompok demografi kecuali kelompok usia 41 tahun ke atas, pendidikan SLTP, ibu rumah tangga, terutama di wilayah DKI dan Jatim.

PENGENAAN PAJAK 11% & POTENSI PENGALIHAN METODE PLATFORM/METODE BELANJA MENURUT DEMOGRAFI [KHUSUS PELAKU E-COMMERCE/BELANJA ONLINE]

	Base	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Ya	Tidak	TT/TJ		Base	Setuju	Tidak setuju	TT/TJ	Ya	Tidak	TT/TJ
GENDER															
Laki-laki	42.7	31.1	65.2	3.6	63.1	31.2	5.7	PENDAPATAN							
Perempuan	57.3	23.6	71.2	5.1	51.8	41.9	6.3	< 1 juta	12.8	51.7	40.7	7.5	44.5	39.3	16.2
USIA								1 - < 2 juta	19.2	27.0	63.0	10.0	63.5	25.9	10.7
<= 21 tahun	15.7	40.1	59.9	0.0	62.5	36.1	1.5	2 - < 4 juta	37.2	25.4	71.7	2.9	53.1	45.1	1.9
22 - 25 tahun	15.9	29.1	69.6	1.3	67.9	29.5	2.7	=> 4 juta	30.8	24.0	72.9	3.2	68.0	29.2	2.8
26 - 40 tahun	40.9	22.8	68.3	8.9	58.0	32.4	9.5	DESA/KOTA							
41 - 55 tahun	17.7	31.9	64.4	3.7	48.9	47.1	4.0	Pedesaan	46.0	28.6	64.1	7.3	56.3	35.4	8.2
> 55 tahun	9.9	9.7	90.3	0.0	37.2	54.9	8.0	Perkotaan	54.0	25.3	72.6	2.1	56.8	38.9	4.2
PENDIDIKAN								WILAYAH							
<= SD	23.9	37.0	54.3	8.7	52.7	38.3	9.0	SUMATERA	20.4	29.5	61.8	8.8	68.4	25.7	5.9
SLTP	16.3	15.0	77.9	7.1	42.3	48.3	9.4	BANTEN	3.5	39.1	60.9	0.0	56.5	43.5	0.0
SLTA	39.3	27.3	69.9	2.8	59.9	35.9	4.2	DKI	6.2	57.1	42.9	0.0	37.4	58.1	4.5
Kuliah	20.4	22.9	76.2	.9	66.0	30.5	3.5	JABAR	25.1	17.1	82.1	.8	58.2	39.4	2.4
PEKERJAAN								JATENG DIY	15.7	40.3	54.9	4.7	66.8	28.9	4.3
Petani/peternak/nelayan	7.2	14.0	68.8	17.2	60.4	30.9	8.7	JATIM	14.5	13.0	85.2	1.8	40.4	51.6	8.0
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	25.7	37.5	57.5	5.0	60.3	34.6	5.2	BAU NUSA	2.4	28.2	71.8	0.0	67.9	29.9	2.2
Wiraswasta, pengusaha	7.7	42.5	56.5	1.0	65.2	31.4	3.4	KALIMANTAN	3.9	24.1	73.8	2.1	62.1	32.1	5.8
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	16.3	23.9	74.2	1.9	63.2	34.0	2.8	SULAWESI	5.3	24.3	69.0	6.8	43.1	38.6	18.2
Ibu Rumah Tangga	26.4	14.8	79.3	5.9	43.5	51.0	5.5	MALUKU PAPUA	2.8	15.4	46.9	37.7	35.7	33.7	30.6
Masih sekolah/kuliah	9.3	34.6	65.4	0.0	60.2	34.8	5.0								
Lainnya	7.4	18.3	80.6	1.1	61.3	28.1	10.5								

V. REKOMENDASI & KESIMPULAN

- Respon masyarakat yang positif terhadap perkembangan pemerataan akses digital perlu dipertahankan dengan kebijakan pemerintah yang kondusif untuk pertumbuhan industri digital.
- Selain isu UU PDP dan pajak *e-commerce*, ada beberapa kerangka hukum yang menjadi sorotan para pelaku usaha teknologi digital seperti pembahasan Omnibus Law sektor finansial yang kemungkinan akan berdampak pada sektor pembayaran digital. Lalu ada juga persoalan penerapan batas maksimal biaya jasa sewa aplikasi di sektor ride-hailing. Contoh lainnya adalah rencana pemerintah untuk menerapkan denda yang substansial akibat pelanggaran penayangan konten ilegal.
- Merujuk pada *global best practice* di mana untuk mendukung inovasi digital, pemerintah negara-negara menerapkan pendekatan *light touch regulation*, pemerintah Indonesia dipandang perlu menahan diri untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung mengarah pada *over-regulation* sehingga mempersulit ruang bisnis perusahaan startup digital untuk dapat berkembang di masa depan. Ditengah kondisi yang kerap disebut sebagai era "*tech winter*" yang dihadapi industri digital secara global dan maraknya berita terkait pengurangan pegawai di perusahaan teknologi *start-up* digital belakangan ini, maka dukungan pemerintah menjadi semakin penting untuk menjaga iklim investasi di dunia teknologi digital agar tetap dapat mendorong inovasi di dalam negeri dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Unduh laporan lengkap rilis survei Indikator bertajuk “Persepsi Masyarakat tentang Pemerataan Akses Digital di Indonesia” di halaman website www.indikator.co.id

Kontak Media

Bawono Kumoro, Peneliti Indikator

Hp: +62-852-1742-7707



INDIKATOR